



Palang
Merah
Indonesia

Jakarta, 26 April 2024

Nomor : 183 /UDD/IV/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD)

Kepada Yth.
Pengurus
PALANG MERAH INDONESIA
Provinsi
di-
Seluruh Indonesia

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa Menteri Kesehatan RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor HK.01.07/MENKES/504/2024 tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah, yang disebutkan bahwa BPPD paling banyak sebesar Rp 490.000,- per kantong darah. Terlampir Surat Keputusan yang dimaksud.

Sehubungan dengan hal itu, mohon agar Pengurus Provinsi dapat segera menyampaikan hal ini kepada Pengurus PMI Kota/Kabupaten dan UDD PMI di wilayah kerja masing-masing, dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Daerah Kota/Kabupaten untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan BPPD tersebut, serta melakukan koordinasi dengan Rumah Sakit /Fasilitas Kesehatan di wilayah kerja masing-masing yang selama ini bekerjasama dengan UDD PMI dalam penyediaan darah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pengurus Pusat
PALANG MERAH INDONESIA
Sekretaris Jenderal


A.M. Fachir

Tembusan Yth:

1. Pengurus PMI Kota/Kabupaten terkait
2. Segenap Kepala UDD PMI

Markas Pusat Palang Merah Indonesia Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 96, Jakarta 12790 - Indonesia
Telepon: +62 21 7992325, Fax: +62 21 7995188, Email: pmi@pmi.or.id, Website: www.pmi.or.id



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/504/2024
TENTANG
PENETAPAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan diperlukan ketersediaan darah atau komponennya yang cukup, aman, bermanfaat, mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menjamin penyediaan darah yang berkesinambungan serta untuk menghasilkan darah transfusi dan/atau komponen darah yang berkualitas, dapat dikenakan biaya pengganti pengolahan darah yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH.

- KESATU : Menetapkan biaya pengganti pengolahan darah paling banyak sebesar Rp.490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) per kantong.
- KEDUA : Biaya pengganti pengolahan darah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan biaya yang digunakan dalam proses pengelolaan darah untuk menghasilkan darah transfusi dan/atau komponennya yang aman sesuai standar, dalam jumlah yang cukup, dan tersedia setiap saat dibutuhkan yang diperhitungkan secara rasional dan nirlaba.
- KETIGA : Besaran biaya pengganti pengolahan darah dalam program jaminan kesehatan nasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tarif pelayanan jaminan kesehatan nasional.
- KEEMPAT : Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan daerah provinsi, dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan biaya pengganti pengolahan darah berdasarkan kewenangan masing-masing, serta dapat berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003